



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Infrastruktur untuk Negeri

DARI KUMPULAN PIDATO PRESIDEN RI 2014-2019

Diterbitkan Oleh:
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
Sekretariat Kabinet RI

Infrastruktur untuk Negeri

PENASEHAT

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
(Sekretaris Kabinet RI)

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si.
(Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet)

EDITOR

Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum., LL.M.
Heru Priyantono, S.H., M.H.
Eko Harnowo, S.S, M.Si.
Saïd Muhidin, S.H., M.H.

KOODINATOR

Rahmi Yuliastri, S. Pd., M. A.

PENULIS

M. Fathoni Muarif, S.I.P.
Shally Lydia Nainggolan, S.Si.

PENDUKUNG

Annisa Syamsiyah, A.Md.

FOTO

Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat
dan Protokol Sekretariat Kabinet RI

DESAIN

Melyadi Amir
Aliyah Damar Fitriyani, S.Kom.

Diterbitkan oleh:

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
Sekretariat Kabinet RI
Jalan Veteran No. 18 Jakarta Pusat 10110
Telp.: (021) 384 67 19 Fax. : (021) 386 23 39

Cetakan Tahun: 2019

ISBN : 978-623-92132-1-3

Dicetak oleh: PT. Mahesa Kusuma Sakti

*Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip seluruh atau sebagian isi buku tanpa izin dari
penerbit*

Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya buku “Infrastruktur untuk Negeri” yang disusun berdasarkan kumpulan pidato, sambutan, amanat, dan dialog Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada acara resmi dan kenegaraan, baik di dalam maupun di luar negeri, selama kurun waktu 2014-2019.

Seperti diketahui bersama, Presiden selaku Kepala Negara/ Pemerintahan melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui pidato untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Kedeputusan Bidang Dukungan Kerja Kabinet, melakukan tugas dan fungsi untuk melakukan perekaman dan pencatatan verbatim pidato Presiden di berbagai acara untuk dibuat dalam bentuk transkripsi. Transkripsi pidato tersebut menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah.

Presiden Joko Widodo mempunyai program-program prioritas dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang disampaikan langsung kepada masyarakat melalui pidato pada saat kunjungan ke daerah dan luar negeri. Selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah banyak capaian yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya pembangunan di bidang infrastruktur. Pemerintah

telah memberikan fokus pada pembangunan infrastruktur dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh negeri, yang mencakup infrastruktur di wilayah perbatasan, infrastruktur energi, infrastruktur konektivitas antardaerah dan antarpulau, infrastruktur telekomunikasi, serta infrastruktur ketahanan pangan.

Buku “Infrastruktur untuk Negeri” ini berisi kebijakan Pemerintah di bidang infrastruktur beserta implementasi dan hasil pembangunan yang telah dicapai. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi pembaca mengenai kebijakan Pemerintah tahun 2014-2019. Dengan kerendahan hati kami mengharapkan agar pembaca dapat memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga kami dapat memperbaiki dan menyempurnakan buku ini di kemudian hari. Selamat membaca!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet,



Thanon Aria Dewangga

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Sebagai Kepala Negara/Pemerintahan, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam rangka melakukan pembangunan di segala bidang sesuai dengan Amanat Konstitusi. Kebijakan-kebijakan Pemerintah tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat agar implementasi kebijakan dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebagai bentuk komunikasi dengan masyarakat, Presiden menyampaikan kebijakan-kebijakan Pemerintah melalui pidato, sambutan, amanat, maupun dialog, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh unsur-unsur Pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Selama kurun waktu 2014-2019, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menetapkan berbagai kebijakan yang disampaikan pada acara-acara resmi dan kenegaraan, baik di dalam maupun luar negeri. Kebijakan-kebijakan tersebut diwujudkan melalui program kerja prioritas yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, dengan tujuan untuk memperkecil kesenjangan, menjadi Indonesia sentris, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Sekretariat Kabinet, yang berfungsi melakukan manajemen kabinet dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden, telah membuat transkripsi verbatim pidato Presiden Joko Widodo di berbagai acara resmi dan kenegaraan. Kumpulan transkripsi

verbatim pidato Presiden tersebut telah disusun kembali dalam bentuk lima buah buku dengan tema masing-masing di bidang infrastruktur, tata kelola pemerintahan, agraria, sumber daya manusia, serta pariwisata. Setiap buku memuat kebijakan-kebijakan Pemerintah melalui program kerja prioritas beserta implementasi dan capaiannya yang telah dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan, pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun, khususnya Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet, dan pihak-pihak lain yang telah membantu.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Semoga buku ini menjadi khazanah koleksi pustaka Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekretaris Kabinet,



Pramono Anung

DAFTAR ISI

Infrastruktur untuk Negeri

PENGANTAR.....	III
SAMBUTAN.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
BAB I LATAR BELAKANG.....	1
A. Sembilan Agenda Prioritas.....	2
B. Visi Misi dan Strategi Pokok Pembangunan Bidang Infrastruktur.....	3
BAB II UPAYA PENGUATAN SENDI-SENDI PEREKONOMIAN BANGSA.....	7
A. Memperkuat Paradigma Baru Pembangunan Indonesia.....	8
1. Mendorong Terobosan Baru dalam Paradigma Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur.....	10
2. Memperkuat Paradigma Pembangunan Indonesia Sentris.....	18
B. Urgensi Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Sendi-sendi Perekonomian Bangsa.....	19
BAB III PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI PENGUNGKIT DAYA SAING.....	33
A. Revitalisasi Infrastruktur Pos Lintas Batas Negara sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru....	33
B. Dukungan Infrastruktur dalam Meningkatkan Konektivitas Nasional dan Efisiensi Ekonomi.....	36
1. Dukungan Infrastruktur Ketahanan Pangan.....	37
2. Dukungan Infrastruktur Konektivitas.....	41

- 3. Dukungan Infrastruktur Energi.....46
- 4. Dukungan Infrastruktur Telekomunikasi.....55

BAB IV PENUTUP.....61

- A. Tantangan dan Harapan pada Periode Kedua
Pemerintah Presiden Joko Widodo.....62
- B. Fokus Pembangunan Pemerintahan Selanjutnya.....64

REFERENSI67

BAB I

LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan nasional Indonesia secara eksplisit telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, Presiden Joko Widodo telah melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi untuk bidang infrastruktur selama periode 2015-2019 pemerintahannya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Presiden Joko Widodo beserta jajaran Menteri Kabinet Kerja dalam bidang infrastruktur adalah terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi. Hal ini merupakan hambatan utama dalam memanfaatkan peluang untuk meningkatkan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik. Dengan demikian, harga komoditas yang dihasilkan oleh suatu daerah,

tidak dapat bersaing karena tingginya biaya produksi.

Terbatasnya kemampuan untuk membiayai pembangunan infrastruktur juga menjadi tantangan yang tidak ringan bagi Pemerintah. Upaya menggali sumber-sumber penerimaan dipandang masih belum optimal. Di samping itu, anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, di antaranya untuk subsidi BBM, masih sangat besar.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menggali sumber-sumber penerimaan dan mengefektifkan pengeluaran pembangunan.

A. Sembilan Agenda Prioritas

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut memuat langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis, disesuaikan dengan karakteristik dan unsur khas dari suatu negara, kedaulatan, sumber daya andalan, dan tantangan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam kaitan dengan bidang infrastruktur, percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan Pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi serta dengan meningkatkan peran kerja sama antara Pemerintah dan Swasta.

B. Visi Misi dan Strategi Pokok Pembangunan Bidang Infrastruktur

Pemerintahan Kabinet Kerja di bawah Presiden Jokowi, di dalam upaya mencapai cita-cita mulia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, memerlukan penetapan

tahapan-tahapan perencanaan pembangunan, berikut penetapan langkah-langkah prioritas pada setiap tahapannya. Penetapan tahapan beserta prioritasnya tersebut dengan mempertimbangkan sejarah, karakter sumber daya yang kita miliki, sekaligus proyeksi terhadap tantangan dan permasalahan yang tengah dan akan dihadapi. Untuk itu, adanya tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan nasional NKRI dirasakan masih tetap diperlukan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup Sasaran Makro, Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, Sasaran Dimensi Pemerataan, Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar-wilayah, Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Dengan demikian, visi pembangunan tersebut mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada awal Pemerintahan Presiden Jokowi, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 bidang infrastruktur adalah Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

BAB II

UPAYA PENGUATAN SENDI-SENDI PEREKONOMIAN BANGSA

Melihat modal sosial dan modal ekonomi yang dimiliki, Presiden Joko Widodo memiliki keyakinan bahwa peluang Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejahtera sangat besar. Potensi yang Indonesia miliki tersebut dapat terlihat dari jumlah penduduk yang besar dan kreatif, kelas menengah yang semakin besar, sistem politik yang demokratis, masyarakat Muslim yang moderat, serta Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp10 ribu triliun rupiah yang membuat Indonesia menjadi kekuatan ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Cita-cita untuk menjadi negara maju dan bermartabat di antara bangsa-bangsa di dunia tersebut dapat tercapai dengan menumbuhkan budaya kerja keras, sikap selalu optimis, serta mengubah sikap konsumtif menjadi produktif.

Sejalan dengan hal tersebut, sejak Kabinet Kerja dibentuk, Pemerintah secara bertahap menjalankan program pembangunan nasional seperti digariskan dalam Nawa Cita. Program yang tengah dijalankan tersebut di antaranya adalah dengan melakukan transformasi fundamental ekonomi. Dalam hal pembangunan infrastruktur, yang dipandang

sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, transformasi ekonomi tersebut di antaranya dilaksanakan melalui penguatan paradigma baru pembangunan Indonesia, yakni mendorong dukungan APBN untuk fokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif serta mendorong skema baru dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur.

A. Memperkuat Paradigma Baru Pembangunan Indonesia

Pada saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara pada Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara tanggal 21 Oktober 2015, Presiden menjelaskan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi makro Indonesia, di antaranya rencana pemerintah untuk melakukan transformasi fundamental ekonomi Indonesia, yaitu di antaranya dengan memprioritaskan kegiatan produktif dibandingkan dengan kegiatan konsumtif, mengedepankan investasi dibandingkan dengan konsumsi, serta mengubah arah kebijakan dari menitikberatkan pada konsumsi menuju hilirisasi, dari konsumsi menuju ke industrialisasi.

Menanggapi pesimisme sebagian elemen masyarakat terhadap kondisi ekonomi Indonesia, Pemerintah menekankan bahwa masyarakat tidak perlu pesimis mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Terlebih lagi bila terdapat masyarakat yang membandingkan dengan kondisi perekonomian tahun 1998, kondisi perekonomian Indonesia tahun 2015 jauh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 jatuh pada -13, sementara pada tahun 2015 berada pada angka 4,7, bahkan pada triwulan ketiga ini sudah naik hingga 4,85. Artinya, setelah berada pada level dasar, angka pertumbuhan mulai merangkak naik. Selain itu, dari sisi pertumbuhan dan dari sisi nilai

tukar rupiah juga sangat berbeda. Pada tahun 1998, nilai tukar Rupiah menyentuh angka Rp16.600, atau naik delapan kali lipat dari sebelumnya Rp2.000,-, sementara tahun 2015 berada pada kisaran Rp13.600,- hingga Rp13.700,- dari sebelumnya Rp12.500,- atau hanya naik 8%.

Terkait penguatan paradigma baru pembangunan Indonesia, BUMN diharapkan memiliki visi yang sama dengan pemerintah, yakni pembangunan tidak Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris, dengan memfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Selain diharapkan untuk dapat segera menyesuaikan dengan target-target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, BUMN juga ditekankan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang tidak hanya diarahkan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga kontribusi dan peran aktif BUMN dalam menghasilkan multiplier effect bagi percepatan pembangunan.

Presiden juga menegaskan akan melakukan pemantauan terhadap BUMN-BUMN secara satu persatu. Hal tersebut sejalan dengan rencana Pemerintah untuk melakukan Holdingisasi BUMN agar seluruh BUMN yang dimiliki, dapat bertransformasi menjadi BUMN yang besar, lincah, dan kuat, yang dilakukan di antaranya melalui reevaluasi aset.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh PT Pelindo (Persero), baik PT Pelindo 1, 2, 3, dan 4, yang telah mampu bertransformasi menjadi sebuah sistem logistik nasional yang berkontribusi untuk menjadikan barang-barang kita murah, biaya transportasi murah, biaya distribusi logistik murah. Diharapkan BUMN yang lainnya dapat melakukan sinergi antar-BUMN, baik dalam pengembangan, kerja sama, operasi, aliansi, dan konglomerasi. Dengan demikian, dapat menggerakkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah serta diharapkan dapat mendukung program swasembada pangan dan peningkatan transportasi massal di kota-kota besar.

1. Mendorong Terobosan Baru dalam Paradigma Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Pada saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja Tahun 2014 pada tanggal 4 November 2014 di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajarannya bahwa APBN negara sangat kecil sehingga satu-satunya jalan untuk mempercepat proses pembangunan adalah melalui investasi. Meskipun demikian, Presiden berharap jajarannya tetap perlu selektif dalam memilih investor dan portofolio investasinya serta memberikan prioritas kepada investor yang akan berinvestasi di bidang pembangunan infrastruktur, baik untuk pembangunan pelabuhan, jalan tol, power plant, maupun untuk pembangunan jalur rel kereta api.

Postur anggaran yang tidak ideal dan tidak mendukung pembangunan infrastruktur juga menjadi sorotan. Dari total APBN sebesar Rp2.019 triliun, sekitar Rp300 triliun dialokasikan untuk subsidi energi, kurang lebih Rp330 triliun untuk subsidi BBM, serta sekitar Rp400 triliun untuk pembayaran utang. Sementara alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur hanya sebesar Rp577 triliun selama lima tahun.

Di tengah besarnya alokasi subsidi APBN untuk kegiatan konsumtif, hasil studi menunjukkan bahwa sebesar 71% masyarakat yang menikmati subsidi BBM adalah kalangan menengah atas. Ditambah lagi dengan tekanan dari situasi eksternal yang membuat perekonomian Indonesia mengalami tekanan dan tantangan. Dilandasi dengan fakta-fakta tersebut, diharapkan kepada jajaran Pemerintah Daerah, seperti Gubernur, Kapolda, dan Kabinda, dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai alasan Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan subsidi yang bersifat konsumtif kepada subsidi yang bersifat produktif, dari yang boros, seperti untuk subsidi BBM, kepada hal yang produktif seperti untuk subsidi

pupuk dan benih untuk petani, serta untuk pembangunan infrastruktur, seperti irigasi dan bendungan, yang juga diarahkan untuk kepentingan petani sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk mencapai target swasembada dalam tiga tahun.

Pemerintah merencanakan pembangunan lima sampai dengan tujuh bendungan setiap tahunnya. Dimulai pada tahun 2014, dengan membangun lima bendungan, dan tahun 2015 membangun tujuh bendungan, dan terus bergulir sampai dengan tahun-tahun berikutnya. Dalam kaitan tersebut, dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dalam negeri, Gubernur diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kekuatan-kekuatan daerahnya masing-masing pada sektor pertanian.

Target tersebut bisa dicapai bilamana terdapat bendungan dan irigasi baru mengingat dari hasil identifikasi di lapangan, 52% irigasi yang ada dalam kondisi rusak. Koordinasi erat di antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, terkait mekanisme pembagian tugas sangat penting dilakukan. Dengan demikian, pada saat pembangunan irigasi/waduknya selesai dalam dua tahun, pasokan air dari waduk hingga ke sawah penduduk sudah bisa dialirkan. Hal itu perlu dikerjakan secara terintegrasi. Presiden menekankan untuk mengantisipasi jangan sampai ketika kabupaten/kota sudah menyiapkan irigasi, sementara waduknya belum jadi sehingga menjadi rusak sebelum sempat digunakan.

Kemudian, sebagian dari alokasi subsidi BBM juga akan diarahkan untuk membeli mesin kapal dan refrigerator, pendingin untuk ikan, bagi para nelayan serta bagi pemberian subsidi untuk penambahan modal kepada usaha mikro, usaha kecil, yang ada di daerah.

Selain akan memberikan prioritas kepada pembangunan

infrastruktur bendungan dan irigasi, pembangunan infrastruktur juga akan diarahkan untuk membangun pelabuhan yang diperlukan di hampir semua provinsi di Indonesia, baik yang memerlukan pembangunan pelabuhan baru ataupun dengan perluasan pelabuhan. Pemerintah menargetkan dalam tiga sampai empat tahun sejak tahun 2014, akan memperluas 24 pelabuhan, dengan pembiayaan melalui investasi ataupun melalui APBN dengan porsi terbesar melalui investasi.

Pembangunan tersebut juga merupakan bagian dari agenda maritim periode pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membangun tol laut dengan tujuan untuk memperlancar distribusi logistik antar pulau. Sebagai negara kepulauan dengan 17 ribu pulau, menjadi hal yang sangat krusial bagi Indonesia untuk mendorong penguatan transportasi laut. Dengan demikian, diharapkan akan menurunkan biaya transportasi logistik barang. Presiden mencontohkan semen, di Jawa seharga Rp60.000 sementara di Papua seharga Rp1.500.000/sak, bahkan ada yang mencapai Rp2.500.000. Apabila program tol laut berhasil dijalankan, diyakini akan dapat menurunkan harga komoditas di luar pulau Jawa.

Rencana pemerintah untuk mengalihkan subsidi dari kegiatan konsumtif kepada kegiatan yang bersifat produktif juga disampaikan Presiden ketika memberikan sambutan pada Pembukaan Kompas 100 CEO Forum di Hotel Four Seasons Jakarta, tanggal 7 November 2014. Dari total APBN tahun 2015 sebesar Rp2.019 triliun APBN tahun 2015, sebanyak Rp433 triliun digunakan untuk subsidi energi, baik subsidi BBM, listrik, dan subsidi-subsidi lainnya. Subsidi BBM sendiri sekitar Rp330-an triliun yang dipandang sebagai subsidi untuk keperluan konsumtif yang sangat besar. Hal itulah yang mendasari kebijakan pengalihan dari subsidi yang bersifat konsumtif kepada subsidi yang bersifat produktif, dalam hal ini dialihkan ke sektor pertanian untuk

menunjang target swasembada pangan.

Direncanakan dalam periode lima tahun pertama Pemerintahan Presiden Jokowi, akan dibangun kurang lebih 25 – 30 waduk dan bendungan. Proses pembangunan tersebut diawali pada bulan Januari - Februari 2015 yang membangun lima, dan pada Juni – Juli 2015 menjadi enam waduk dan dam. Total pembangunan waduk dan bendungan pada tahun 2015 direncanakan berjumlah 11.

Dari peninjauan lapangan ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, Presiden Jokowi telah menginventarisasi bahwa sekitar 52% dari seluruh irigasi berada dalam kondisi rusak. Kondisi tersebut merupakan faktor penghambat dari rencana swasembada pangan. Untuk itu, setelah dilakukan estimasi dan penghitungan, apabila infrastruktur irigasi tersebut diperbaiki, maka akan meningkatkan hingga lebih dari 30% produksi pangan. Terlebih lagi bila ditambah dengan pembangunan waduk baru, maka produksi pangan akan meningkat secara signifikan. Meskipun demikian, hal tersebut harus ditunjang dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Misalnya, bendungan dibangun oleh pemerintah pusat, tetapi irigasi hingga irigasi tersiernya dibangun oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan harus dikerjakan dengan koordinasi dan perencanaan yang matang sehingga saat bendungan telah jadi dan siap digunakan, saluran irigasi pun sudah siap.

Selain itu, pengalihan subsidi BBM juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur pelabuhan. Hal itu dipandang penting untuk menjadi prioritas setelah pembangunan infrastruktur untuk menunjang produksi pertanian. Hal tersebut penting mengingat pelabuhan merupakan infrastruktur utama dalam proses pengiriman barang. Dengan demikian, produk

dari seluruh daerah di Indonesia menjadi lebih kompetitif. Selama periode pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi menargetkan akan membangun 24 pelabuhan dengan porsi terbesar dari pendanaannya bersumber dari sektor investasi.

Sehubungan dengan agenda maritim dari pemerintahannya, Pemerintah merespons banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai maksud dari tol laut yang akan dibangun dan dikembangkan. Tol laut yang dimaksudkan adalah Pemerintah akan membangun transportasi laut yang memadai, mengingat Indonesia terdiri dari 17 ribu pulau. Dengan adanya transportasi laut yang baik dan dapat diandalkan, diharapkan biaya transportasi perpindahan barang dari satu daerah ke daerah lainnya dapat ditekan, dengan demikian akan menurunkan harga barang/komoditas dari suatu daerah dan meningkatkan nilai kompetitif dari komoditas tersebut.

Demikian pula sebaliknya, bilamana Indonesia tidak memiliki transportasi laut yang baik dan dapat diandalkan sebagai penghubung dari pulau-pulau yang berjumlah 17 ribu, maka mengakibatkan harga komoditas/barang di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia kita akan berbeda secara signifikan. Hal tersebut sebagaimana yang masih terjadi pada waktu sekarang ini. Ide tol laut tersebut berangkat dari keprihatinan Presiden setelah mendengar informasi bahwa harga semen di Jawa Rp60-70 ribu, di Papua Rp1,5 juta, bahkan ada yang Rp2,5 juta per sak.

Namun demikian, yang masih perlu dipikirkan secara matang adalah kapal yang berangkat dari Indonesia bagian barat menuju Indonesia bagian timur dengan membawa komoditas, tetapi ketika kembali dari Timur menuju barat, tidak membawa komoditas. Untuk itu, perlu diupayakan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah Indonesia bagian timur juga harus digarap secara serius. Sehingga aktivitas lalu lintas kapal dari

barat, ke tengah, ke timur, kemudian ditransfer lagi ke pulau-pulau yang lebih kecil, dapat terus ada dan menggeliat.

Presiden mengakui kekurangan jumlah kapal yang ada sangat banyak, bukan hanya ratusan tetapi puluhan ribu. Bahkan kapal-kapal yang ada di lapangan pun sudah berusia puluhan tahun, sebagian besar kapal-kapal pembuatan tahun 70-an dan tidak pernah dilakukan pembaharuan. Peremajaan kapal juga merupakan bagian yang akan ditawarkan Pemerintah kepada investor.

Pada saat memberikan sambutan pada acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Tahun 2017, 17 Februari 2017, di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan pemerataan ekonomi, meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong terbukanya lapangan kerja serta terciptanya kesempatan UKM-UKM di daerah untuk tumbuh.

Namun demikian, untuk membangun proyek-proyek infrastruktur, diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit sehingga terobosan-terobosan dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur, seperti mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah atau PINA, selain skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau PPP. Untuk itu, Pemerintah menyambut baik Financial Closing Waskita Tol Road sebagai proyek PINA pertama. Pemerintah berharap proyek PINA tersebut dapat menjadi awal yang baik bagi percepatan pembiayaan investasi pembangunan jalan tol Waskita Tol Road senilai Rp 70 triliun.

Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak bagi Indonesia mengingat infrastruktur yang ada telah kalah jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal itu membuat daya saing atau competitiveness Indonesia kalah.

Selain itu, infrastruktur juga diyakini akan menumbuhkan investasi dan juga pemerataan kepada seluruh masyarakat Indonesia karena setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat dipastikan akan membuka rekrutmen tenaga kerja, baik pada saat pembangunan maupun pada setelah proyek tersebut telah selesai dibangun.

Sebagai contoh pembangunan infrastruktur pelabuhan di mana sebelumnya tidak didatangi kapal secara rutin, setelah pembangunan selesai dilaksanakan, selalu ada kapal yang datang secara rutin sehingga meningkatkan aktivitas perekonomian di pelabuhan tersebut, baik dengan terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berjualan di sekitar areal pelabuhan, warga dapat menjadi buruh angkut pelabuhan, dan lain sebagainya.

Meskipun pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis bagi pertumbuhan ekonomi, Pemerintah tidak dapat terus bergantung kepada APBN dalam pembiayaannya. Selain karena keterbatasan APBN yang dimiliki oleh Pemerintah, pembangunan yang hanya mengandalkan APBN juga tidak dapat mendorong percepatan pembiayaan pembangunannya. Oleh sebab itu, terobosan skema-skema pembiayaan khusus seperti PPP (Public Private Partnership), reksadana terbatas, terus dilakukan oleh Pemerintah.

PT Taspen (Persero) yang sebelumnya tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur, sejak masa Pemerintah Presiden Joko Widodo mulai dilibatkan sehingga bisa mendukung PT SMI untuk memperkuat equity yang ada. Pemerintah meyakini bila terobosan-terobosan seperti itu terus dilakukan, maka akan banyak sekali infrastruktur yang sebelumnya hanya tergantung kepada APBN, sekarang tidak. Terobosan-terobosan dalam skema pembiayaan dapat bervariasi, di antaranya adalah investasi murni, PPP, KPBU, maupun dengan skema-skema

lainnya.

Selin itu, Presiden juga melibatkan kontraktor-kontraktor kecil serta UKM-UKM yang ada di daerah tempat proyek infrastruktur dibangun agar dapat meningkatkan perekonomian mereka.

Model pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari non anggaran pemerintah harus terus digiatkan. Negara-negara lain, seperti Kanada ataupun Malaysia, sudah lebih dahulu menggunakan dan mengalokasikan dana-dana pensiun dan dana-dana pengelolaan jangka panjang untuk diinvestasikan ke dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, Indonesia tidak boleh tertinggal.

Di tengah era kompetisi global seperti sekarang ini, yang salah satunya ditandai dengan perubahan yang sangat radikal, bangsa Indonesia kita harus berani mendobrak pakem untuk melakukan terobosan. Diharapkan terobosan-terobosan model pembiayaan pembangunan infrastruktur perlu diperluas implementasinya di masa yang akan datang.

Model pembiayaan tersebut tidak hanya berlaku untuk pembangunan jalan tol, akan tetapi dapat diimplementasikan pada berbagai sektor lainnya, baik pembangunan pelabuhan, bandara, pembangunan infrastruktur energi seperti pembangkit listrik, kilang minyak dan dan lain sebagainya. Pemerintah harus berani keluar dari zona nyaman membangun infrastruktur melalui pembiayaan dari APBN semata.

Selanjutnya, dalam rangka terus mendorong peran badan usaha dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Bappenas telah menetapkan daftar rencana proyek KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) dan PPP Book tahun 2017. Hal tersebut juga didukung dengan pembentukan kantor bersama KPBU untuk mempercepat proses koordinasi proyek-proyek KPBU. Diharapkan agar setiap kementerian dan lembaga terkait dapat terus bersinergi dalam memanfaatkan

skema-skema pendanaan. Presiden berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembiayaan melalui skema PINA dan KPBU.

2. Memperkuat Paradigma Pembangunan Indonesia Sentris

Ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai alasan pembangunan Infrastruktur dibangun dari pinggiran atau dari perbatasan dalam wawancara doorstop kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, tanggal 23 Maret 2016, Presiden menjelaskan agar titik-titik pertumbuhan ekonomi juga terdapat di pinggiran, baik di Kalimantan, NTT, maupun di Papua, sehingga paradigma pembangunan di Indonesia tidak lagi Jawa-sentris, tetapi Indonesia sentris. Selain itu, pembangunan pos lintas batas negara tidak hanya membangun bangunan pos lintas batas, tetapi juga infrastruktur jalan, dari sebelumnya hanya lima meter menjadi 20 meter.

Kebijakan tersebut juga didasari oleh dorongan untuk menunjukkan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara besar, bangsa besar. Dan, pembangunan fisik adalah salah satu upaya untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar. Indonesia perlu menunjukkan bahwa perbatasan negara, sebagai jendela dan sebagai halaman muka Indonesia, merupakan sebuah kebanggaan dan ketika ada orang masuk ke Indonesia, mereka merasakan bahwa Indonesia merupakan negara besar.

Pada saat memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Pemerintah dengan Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, tanggal 21 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa paradigma pembangunan di Indonesia tidak lagi Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris, terutama Indonesia bagian Timur, sehingga Pemerintah lebih memprioritaskan untuk

menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk Indonesia bagian timur. Meskipun masih terdapat beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang masih digalakkan di pulau Jawa, seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, dijelaskan bahwa pembiayaan pembangunan proyek kereta cepat tersebut bukan melalui skema APBN, tetapi B2B atau Business to Business.

Upaya Pemerintah untuk menyusun agenda pembangunan infrastruktur dengan mengacu pada paradigma Indonesia sentris telah terlihat pada pembangunan jaringan rel kereta api di Sulawesi, dan feasibility Study untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Papua, pembangunan tol Trans Sumatra di wilayah Sumatra, serta pembangunan dan pengembangan bandar udara di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk pembangunan tol Balikpapan – Samarinda di Kalimantan Timur.

Selain itu, Pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan, yakni pembangunan waduk di mana Pemerintah menargetkan untuk membangun 49 waduk. Dengan demikian, diharapkan dengan pembangunan 49 waduk di seluruh wilayah di Indonesia tersebut sudah dapat mengairi sekaligus memperluas wilayah persawahan di Indonesia yang akan berdampak pada meningkatnya produksi di dalam negeri.

B. Urgensi Pembangunan Infrastruktur dalam Memperkuat Sendi-sendi Perekonomian Bangsa

Pada saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional Partai Nasional Demokrat di Jakarta, tanggal 21 September 2015, Presiden Joko Widodo menyampaikan mengenai tantangan ke depan, yakni fakta besarnya angka impor komoditas pada tahun 2014, yakni gandum 7,4 juta ton, gula 3,2 juta ton, dan jagung 3,3 juta ton. Besarnya nilai impor

inilah yang menyebabkan kegoncangan neraca perdagangan karena impor menggunakan mata uang Dolar sebagai alat pembayaran. Hal ini pula yang dipandang sebagai salah satu penyebab nilai tukar rupiah terhadap Dolar pada posisi yang lemah seperti sekarang ini.

Pemerintah juga memimiliki tantangan lainnya, yakni mengubah pola pikir mayoritas masyarakat Indonesia yang masih senang dengan produk impor, baik sepatu, tas, maupun jam tangan. Dengan populasi lebih dari 250 juta jiwa, bila menggunakan produksi dalam negeri, maka akan membawa dampak positif bagi perekonomian.

Sehubungan dengan pembangunan bidang infrastruktur, para calon kepala daerah yang hadir di acara tersebut diharapkan apabila pada saatnya nanti terpilih menjadi pimpinan di daerah, memberikan prioritas dalam bekerja merupakan sebuah keharusan. Diharapkan tidak terlebih dahulu membangun kantor bupati, kantor walikota, atau kantor gubernur yang mewah, melainkan memprioritaskan untuk membangun infrastruktur berupa bendungan/waduk dan saluran irigasi mengingat sebagian besar bendungan/waduk berada dalam kondisi rusak.

Pentingnya kepala daerah untuk memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur juga didasari fakta tidak adanya pembangunan infrastruktur bendungan/waduk selama beberapa waktu terakhir.

Selain membangun infrastruktur bendungan/waduk, Presiden juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur konektivitas berupa jalan dan pembangunan pelabuhan. Hal itu bertujuan untuk mengurangi biaya distribusi logistik dan transportasi, serta mengurangi antrean di pelabuhan.

Komitmen Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur terlihat dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan

anggaran pembangunan infrastruktur hingga dua kali lipat, yakni sebesar Rp290 triliun untuk tahun 2015, dan lebih dari Rp300 triliun untuk tahun 2016. Selain itu, untuk tahun 2016, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran transfer ke daerah dan anggaran dana desa masing-masing sebesar Rp735 triliun dan Rp47 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengutarakan bahwa Pemerintah tengah membangun 49 bendungan di seluruh Indonesia, di antaranya bendungan di Ratnamo, NTT, dan bendungan di Krueng Kerto, Aceh. Direncanakan dalam 3,5 tahun berikutnya dapat diselesaikan pembangunan 49 bendungan. Melalui kebijakan untuk memberikan prioritas pembangunan bidang infrastruktur tersebut, diharapkan bahwa, ke depan, di setiap provinsi akan terdapat irigasi, baik irigasi besar maupun yang irigasi kecil. Dan pada saat pembangunannya sudah selesai, kewajiban pemeliharaan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Prioritas pembangunan infrastruktur lainnya adalah berupa pembangunan jalan tol. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga memberikan paparan mengenai pembangunan tol Sumatra, yakni ruas dari Lampung hingga Palembang yang akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun, baru kemudian pembangunan akan diarahkan ke barat, atau ke Aceh.

Dalam menjawab keraguan masyarakat bahwa selama ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan hanya sebatas pada kegiatan groundbreaking, tanpa ada tindak lanjut pembangunannya. Presiden menegaskan bahwa perkembangan pembangunan sudah terlihat di setiap section-nya, meskipun belum panjang. Presiden mencontohkan, misalnya, untuk setiap section, sudah terbangun sejauh tujuh hingga dua belas kilometer.

Selain itu, terkait pembangunan power plant dan pelabuhan, Pemerintah juga sudah memulai pembangunan di beberapa

titik. Ketersediaan energi listrik juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo mengingat tanpa listrik, industri tidak akan bergerak, anak-anak tidak bisa belajar di malam hari, dan usaha kecil, usaha mikro, yang ada di desa, di kampung, juga tidak bisa berproduksi. Sementara pembangunan pelabuhan, sudah dimulai di Muara Tanjung, Sumatra Utara, dan di New Makassar Port, dan pada bulan Oktober 2015, akan mulai pembangunan di Sorong, Papua

Pada saat memberikan sambutan pada Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Istana Negara, Jakarta, tanggal 30 November 2016, Presiden menyampaikan pengalamannya melakukan kunjungan kerja ke Tuban, Jawa Timur, terkait pemanfaatan dana desa. Pada saat peninjauan di salah satu desa di Tuban Desa Sumurgeneng, Presiden merasa puas melihat dana desa sudah dimanfaatkan untuk membangun irigasi dan dikerjakan oleh warga desa sendiri. Selain itu, Presiden juga memastikan bahwa dana desa yang telah dialokasikan, tidak ada pemotongan, baik dari birokrasi tingkat provinsi, hingga ke aparat desa. Presiden juga berpesan apabila terdapat pihak yang memotong dana desa, agar segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti oleh Presiden.

Pada tahun 2015, Pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp20,5 triliun untuk seluruh Indonesia. Dan pada tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi Rp47 triliun. Direncanakan pada tahun 2017, lebih meningkat lagi menjadi Rp60 triliun, dan pada tahun 2018, Presiden menginstruksikan kepada para menteri terkait untuk dapat mengalokasikan hingga Rp120 triliun.

Presiden menyampaikan bahwa dirinya telah memerintahkan Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri PUPR, bahwa mulai tahun 2017, berkonsentrasi untuk pembangunan waduk atau embung karena Presiden mempelajari bahwa di negara-

negara yang pertaniannya bagus, mereka memiliki sistem pengairan yang baik. Indonesia adalah negara dengan surplus air yang harus dikelola dengan baik. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan langkah-langkah cepat karena Presiden meyakini bahwa Indonesia memiliki peluang besar menjadi lumbung pangan dunia.

Sementara itu, pada saat memberikan sambutan saat menerima Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LI dan LII Lembaga Ketahanan Nasional Lemhannas RI tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, tanggal 18 November 2014, Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan Wakil Partai Komunis Cina dan menanyakan alasan negaranya tidak kuatir untuk membuka investasi asing secara besar-besaran dan tidak takut untuk dikuasai oleh ideologi kapitalis.

Dijelaskan bahwa Cina tidak memiliki kekhawatiran akan penguasaan terhadap aset negaranya mengingat mereka tidak beranggapan bahwa membuka investasi berarti membuka peluang bagi investor untuk menguasai. Mereka berkeyakinan bahwa asetnya tetap berada di negara mereka. Pelajaran yang dapat diambil adalah foreign direct investment positif untuk sebuah negara.

Dengan cara pandang yang terbuka tersebut, dalam waktu yang sangat singkat, kerja sama antara investor dengan BUMN Cina berlangsung secara masif dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan cadangan devisa yang besar. Bahkan mata uang Cina sekarang ini telah beredar di seluruh penjuru dunia, termasuk investasi Cina pun berada di hampir semua negara.

Hal senada juga disampaikan saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Xi Jin Ping. Presiden Xi menyampaikan tiga kunci sukses dari pengalaman Cina, yakni partai yang harus

bersatu karena partai yang bersatu akan menguatkan negara. Kedua, memiliki gagasan besar, memiliki visi jauh ke depan, dan memiliki mimpi besar, dengan didukung perencanaan jangka panjang yang matang, tidak hanya 20 sampai 30 tahun, bahkan hingga 100 tahun. Dan ketiga, mengejar pembangunan infrastruktur, membangun konektivitas antarkota dan antarpulau. Dengan terbangunnya konektivitas antarkota dengan kota, provinsi dengan provinsi, pulau dengan pulau, maka ekonomi rakyat akan menggeliat.

Untuk itu, Presiden berharap pemikiran-pemikiran besar seperti yang diterapkan di Cina tersebut dapat diadopsi. Dari semula tidak memiliki anggaran untuk Infrastruktur, tetapi dengan membuka investasi masuk ke negaranya, hingga saat sekarang ini Cina menjadi negara investor besar. Pola-pola revolusi mindset sebagaimana yang ditunjukkan oleh Cina tersebut dipandang diperlukan dalam merespons perubahan global yang sangat cepat seperti sekarang ini.

Selain itu, Presiden menyampaikan keprihatinannya ketika menceritakan pengalaman bertemu dengan Presiden Viet Nam. Beliau menanyakan kapan Indonesia akan membeli beras mereka, padahal Indonesia merupakan negara agraris. Untuk itu, Presiden memberikan target kepada Menteri Pertanian dalam tiga sampai empat tahun sejak tahun 2014 harus mencapai swasembada pangan.

Presiden menyebutkan bahwa jumlah irigasi yang rusak sebanyak 52% dan selama lima belas tahun, belum ada waduk yang dibangun. Untuk itu, Presiden menargetkan untuk membangun 30 waduk selama lima tahun ke depan. Selain itu, Presiden juga menyoroti masalah benih, yakni mengandalkan impor sehingga bangsa Indonesia melupakan penguasaan teknologi untuk memperbaiki kualitas benih.

Presiden juga mengilustrasikan kebijakan Pemerintah terkait

pengalihan subsidi BBM dari, konsumtif ke kegiatan-kegiatan produktif. Pada tahun 2015, dari jumlah APBN Indonesia sebesar Rp2.039 triliun, alokasi untuk subsidi mencapai Rp433 triliun, sebagian untuk subsidi BBM Rp300 triliun. Sementara alokasi untuk membangun infrastruktur hanya Rp570 triliun, dan kesehatan hanya Rp220 triliun. Bila angka subsidi tersebut dialokasikan untuk membangun Infrastruktur, misalnya membangun waduk, biaya membangun waduk sekitar Rp400 sampai 500 milyar, dapat membangun sebanyak 1.400 waduk. Atau untuk membangun Infrastruktur membangun jaringan rel kereta api Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi yang hanya membutuhkan biaya sebesar Rp15 milyar per kilometer.

Pengalihan alokasi subsidi tersebut juga akan digunakan untuk membangun 24 pelabuhan, baik pelabuhan baru, maupun perluasan pelabuhan yang sudah ada. Skema yang digunakan pembangunan pelabuhan tersebut selain dari APBN juga melalui investasi. Dengan demikian, diharapkan kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia bukan hanya yang berjenis vessel, tetapi matrix vessel-nya juga masuk ke pelabuhan kita sehingga tidak perlu melewati negara lain, melainkan dapat langsung ke tujuan di wilayah-wilayah di Indonesia.

Pada saat menyampaikan paparan pada acara Silaturahmi dengan Dunia Usaha di Jakarta Convention Center, Jakarta, tanggal 9 Juli 2015, Presiden menerangkan bahwa fokus Pemerintah untuk jangka menengah dan jangka Panjang adalah pada pembangunan infrastruktur. Buruknya infrastruktur di Indonesia saat ini menjadi salah satu hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perbaikan infrastruktur dipandang dapat berperan penting untuk menekan biaya produksi, menekan biaya transportasi, dan menekan biaya distribusi. Selain itu, distribusi logistik melalui laut dipandang

sebagai sarana distribusi yang paling murah, sehingga pembangunan dikonsentrasikan pada tol laut.

Pembangunan sudah dimulai di Kuala Tanjung dan di Makassar. Selain itu, pada bulan April 2015, pembangunan jaringan jalan tol Trans-Sumatera, yang nantinya akan membentang dari Lampung menuju ke Palembang, Padang, Pekanbaru, Medan, hingga Aceh sepanjang 2600 km, sudah dimulai pembangunannya.



Presiden Jokowi pada saat peninjauan *progress* pembangunan jalan tol Trans Sumatera di Lampung, tanggal 6 November 2015

Sementara itu, pada saat memberikan keterangan pers usai sholat dzuhur berjamaah di Masjid Babussalam, Komplek Pesantren Babussalam Meulaboh, Aceh, tanggal 16 Juli 2015, menyampaikan bahwa dirinya telah menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun waduk dan irigasi di wilayah Aceh Barat untuk mendorong produksi padi dan beras di wilayah tersebut.

Pada wawancara doorstop setelah melakukan Peninjauan Pembangunan Bendungan Raknamo di Kupang Timur,

Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 Juli 2015, Presiden menyampaikan kegembiraannya melihat kemajuan pembangunan bendungan di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah serius untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang telah direncanakan, baik berupa bendungan, waduk, jalan, dan lain sebagainya.

Khusus untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, Presiden menyampaikan bahwa kuncinya adalah ketersediaan air. Setelah air tersedia, baru dapat diupayakan komoditas yang akan ditanam. Untuk itu, Presiden berkomitmen untuk membangun sebanyak tujuh waduk di seluruh Provinsi NTT dan 100 embung sedang.

Hal senada juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional VIII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, tanggal 28 Juli 2015. Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia akan menjadi pemasok pangan dunia. Keyakinan tersebut diungkapkan dengan mengambil contoh pemetaan permasalahan dan solusi yang diambil oleh Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, provinsi yang selama ini tidak bisa melakukan cocok tanam mengingat permasalahannya kurangnya sumber air di daerah tersebut kurang mendapat perhatian.

Oleh sebab itu, dari 49 waduk yang akan dibangun selama lima tahun pertama pemerintah Presiden Joko Widodo, tujuh waduk dibangun di wilayah NTT yang kesemuanya dimulai pada tahun 2015. Presiden meyakini, permasalahan buruknya manajemen air di wilayah NTT akan dapat teratasi melalui pembangunan waduk dan saluran irigasi yang memastikan adanya aliran air hingga masuk ke lahan pertanian warga.

Pada saat melakukan wawancara doorstop setelah

Pembukaan Seminar dan Pameran Indo Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) di Jakarta Convention Center, tanggal 19 Agustus 2015, Presiden mengakui bahwa target penyediaan energi listrik sebesar 35.000 megawatt merupakan target yang sangat ambisius. Namun demikian, Presiden lebih memperhatikan kebutuhan tenaga listrik Nasional yang sangat besar sehingga Presiden berkomitmen untuk memastikan jajarannya dapat memenuhi target penyediaan energi listrik Nasional sebesar 35.000 megawatt.

Komitmen Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan implementasi program-program pembangunan tercermin saat memberikan arahan pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penganugerahan Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2016, di Istana Negara Jakarta, tanggal 14 Desember 2015. Presiden menyampaikan bahwa penyerahan DIPA tahun 2016 pada pertengahan bulan Desember 2015 mencerminkan keinginan kuat Pemerintah agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata, dan memberikan dampak multiplikasi yang lebih besar pada pembangunan dan perekonomian Indonesia.

Merujuk hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR, belanja negara dalam APBN Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp2095,7 triliun, atau meningkat 5,6% dibandingkan dengan APBNP tahun 2015. Distribusi dari volume belanja negara tersebut 37,4% atau sekitar Rp784,1 triliun di antaranya dialokasikan melalui kementerian dan lembaga, dan sebesar 36,7 persen atau sekitar Rp770,2 triliun berupa transfer ke daerah dan dana desa, sementara sisanya, sebesar 25,8 persen atau sekitar Rp541,4 triliun dialokasikan melalui Kementerian Keuangan

selaku Bendahara Umum Negara.

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan DIPA Tahun 2015 pada Desember 2015 tersebut, selanjutnya Presiden menginstruksikan pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam tahun 2016, di antaranya kegiatan lelang proyek pembangunan, dapat segera dimulai dan jangan sampai terlambat karena dapat keterlambatan dapat mengakibatkan kontraksi ekonomi. Selain itu, Presiden menginginkan agar pola lama dalam pemerintahan yakni penyerapan belanja menumpuk pada akhir tahun harus segera diakhiri. Bahkan, Presiden akan memantau secara langsung agar kegiatan merata sepanjang tahun, daerah-daerah yang serapannya masih kecil, dan daerah-daerah yang menyimpan uangnya di BPD, dimulai dari bulan Januari.

Para Menteri, Kepala Lembaga Nonkementerian juga diperintahkan untuk melakukan pengecekan secara rinci anggaran di lembaga masing-masing, apakah masih terdapat alokasi anggaran yang bersifat pemborosan. Para Menteri harus mengetahui dan memahami alokasi dana di kementeriannya dialokasikan mengingat APBN adalah uang rakyat dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Pemerintah.

Presiden juga meminta para Menteri, Kepala Lembaga, Pak Gubernur, Bupati, Walikota, bahwa anggaran yang dikeluarkan harus tepat sasaran dan berdampak pada rakyat serta meniadakan program kegiatan yang tidak jelas, tidak konkret atau kalimatnya bersayap. Seperti kata 'Pemberdayaan', 'peningkatan', dapat langsung menggunakan istilah yang spesifik seperti 'pembelian kapal, 'pembelian jaring', atau 'pembelian benih'.

Dengan demikian, penggunaan uang rakyat dapat lebih optimal, lebih konkret, lebih terukur, dan lebih tepat sasaran. Rakyat juga menjadi semakin tahu karena peruntukannya

jelas dan semakin mudah menangkap program yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah.

Sementara itu, saat menyampaikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Nasional IV Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, tanggal 17 Desember 2015, Presiden menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kerja sama dan sinergi, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara gubernur dan DPRD Provinsi, antara bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. Sinergi baru dapat berjalan secara efektif apabila terdapat paradigma yang sama, pemahaman yang sama, pola pikir yang sama tentang tujuan yang sama-sama ingin dicapai.

Presiden juga menekankan agar seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, memperhatikan arah dan tujuan pembangunan serta memperhatikan indikator-indikator keberhasilan pembangunan. Hal tersebut penting untuk menghindari situasi di mana upaya, kerja keras, dan sumber daya yang sudah dikeluarkan menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Untuk itu, perencanaan pembangunan daerah harus satu garis dengan perencanaan pembangunan nasional dan adanya integrasi antara program-program pembangunan di daerah tanpa mengabaikan kondisi dan karakteristik yang berbeda dari masing-masing daerah.

BAB III

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI PENGUNGKIT DAYA SAING

Melalui pembangunan infrastruktur, di antaranya pembangunan tol laut dengan penambahan trayek rute dari kapal-kapal, Pemerintah meyakini bahwa harga komoditas di wilayah-wilayah yang dilalui oleh rute trayek dari kapal-kapal tersebut, akan dapat diturunkan. Dengan demikian, cita-cita Pemerintah untuk menyamakan harga komoditas di pulau Jawa dengan Papua, bahkan di seluruh wilayah di Indonesia, akan dapat tercapai.

Dengan mendorong pemerataan kehidupan sosial ekonomi, seluruh rakyat Indonesia akan merasa berdiri di Tanah Air yang sama dan merasa hidup di rumah kebangsaan yang sama, yakni Indonesia.

A. Revitalisasi Infrastruktur Pos Lintas Batas Negara sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam hal pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu instrumen penting dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan

renovasi total atas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong, Kalimantan Barat. Pembangunan tersebut dipandang penting mengingat batas negara adalah etalase terdepan dari Indonesia yang harus mencerminkan kebanggaan, harga diri, dan martabat bangsa Indonesia.



Presiden Jokowi pada kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 23 Maret 2016

Pada saat memberikan sambutan dalam acara Peresmian Pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia Tahun 2017 di Jakarta Convention Center, tanggal 2 Februari 2017, Presiden mengungkapkan kegembiraannya bahwa Pembangunan PLBN di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, di Entikong, Kalimantan Barat, yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh pembangunan, saat ini sudah selesai dibangun dan diresmikan. Bahkan, saat ini tiga sampai empat kali lebih baik dari PLBN yang dimiliki oleh negara tetangga, Malaysia.

Demikian juga dengan PLBN di perbatasan antara NTT dengan Timor Leste, baik PLBN Motaain maupun PLBN Motamasin,

yang telah dilakukan pembangunan kembali. Bahkan, Presiden mengilustrasikan kegembiraannya dengan membandingkan saat sebelum dilakukan renovasi, di mana orang Indonesia senang sekali berswafoto dengan latar belakang PLBN negara tetangga. Namun, pada saat ini, justru warga negara tetangga yang gemar melakukan swafoto dengan latar belakang PLBN Indonesia.

Selain pembangunan PLBN di Entikong, Motaain, dan Motamasin, Pemerintah juga telah membangun PLBN di Badau dan PLBN Aruk yang keduanya berada di Kalimantan Barat. Bahkan, untuk PLBN Aruk, pemerintah menjadikan PLBN Aruk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, tidak hanya sebatas berfungsi sebagai kantor Imigrasi, kantor Karantina, maupun kantor Bea Cukai.

Apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi juga disampaikan untuk Provinsi Kalimantan Barat yang berada di atas rata-rata nasional, yakni 5,22 persen, mengingat, di tengah perlambatan ekonomi dunia saat itu, Kalimantan Barat dapat mencatat pertumbuhan di atas rata-rata Nasional, yakni 5,02. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri, termasuk ke dalam tiga besar terbaik tingkat dunia, setelah India dan China sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tanggal 17 Maret 2017.

Selain itu, pada saat meresmikan PLBN Terpadu Skouw di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua, tanggal 9 Mei 2017, Presiden menekankan komitmennya bahwa sejak hari pertama dilantik, Pemerintahannya akan lebih memperhatikan daerah-daerah perbatasan karena wilayah-wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan Indonesia yang harus menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, pembangunan PLBN tersebut juga harus menciptakan kantong-

kantong pertumbuhan ekonomi baru. Untuk itu, Pemerintah membangun pasar modern sekaligus melakukan pembinaan guna mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi baru tersebut.

Presiden juga membandingkan harga komoditas di Papua yang jauh lebih baik dan lebih murah dibandingkan dengan harga di Papua Nugini pada saat dirinya melakukan kunjungan ke Port Moresby, Papua Nugini. Untuk itu, Presiden melihat peluang besar untuk menyuplai komoditas ke Papua Nugini dan menjadi tugas bersama untuk membangkitkan kegiatan ekonomi di daerah-daerah perbatasan. Presiden juga menginstruksikan agar kegiatan ekspor di PLBN tersebut harus diintegrasikan dan dijalankan sistem pengelolaan kawasan perbatasan secara lebih terpadu, lebih terintegrasi. Hal ini penting untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Kawasan sekitar PLBN. Selain itu, zona pendukung yang sudah dikembangkan untuk terminal barang maupun penumpang, pusat perdagangan, dan pasar modern.

B. Dukungan Infrastruktur dalam Meningkatkan Konektivitas Nasional dan Efisiensi Ekonomi

Pada saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-44 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta Convention Center, tanggal 10 Januari 2017, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pada semester kedua tahun 2016, sekaligus merupakan tahun kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo, di tengah tantangan perlambatan ekonomi dunia, Indonesia mencatat angka pertumbuhan ekonomi pada angka 5,18%. Hal tersebut merupakan sebuah capaian yang membanggakan mengingat Indonesia berada pada urutan nomor tiga tertinggi angka pertumbuhan ekonominya di antara negara-negara G-20. Seiring dengan optimisme tersebut, diyakini bahwa kebijakan Pemerintah yang

tengah diimplementasikan, yakni membangun dari pinggiran, membangun dari pulau terdepan, dan membangun dari desa, merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai ekonomi Pancasila.

Selain fokus pada pembangunan PLBN di wilayah-wilayah perbatasan negara, Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan konektivitas nasional dan efisiensi ekonomi, di antaranya adalah pembangunan bandara di pulau-pulau terdepan Indonesia, pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan tol, pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan seperti pembangunan waduk, bendungan dan saluran irigasi, serta pembangunan infrastruktur energi. Sebagai contoh adalah pembangunan bandara di pulau Natuna. Pemerintah tidak hanya melakukan perpanjangan runway, tetapi juga mengembangkan industri perikanan di pulau tersebut. Dengan demikian kegiatan perekonomian dapat lebih ditingkatkan.

Sejalan dengan upaya mendorong paradigma baru pengalokasian APBN untuk dititikberatkan pada pembiayaan kegiatan-kegiatan produktif, Pemerintah telah mengalokasikan dana desa, yakni pada tahun 2015 sebesar Rp20,5 triliun, tahun 2016 sebesar Rp47 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, yang dananya digunakan untuk membangun infrastruktur desa, baik berupa jalan desa, infrastruktur irigasi, dan pembangunan jembatan. Pengecekan langsung ke lapangan juga terus-menerus dilakukan dalam rangka memastikan pengalokasian dan penggunaannya sudah tepat sasaran.

1. Dukungan Infrastruktur Ketahanan Pangan

Pemerintah meyakini bahwa langkah strategis bagi pencapaian target swasembada pangan adalah mengupayakan terpenuhinya kebutuhan akan pasokan air bagi sektor pertanian. Pasokan air diupayakan di antaranya

melalui pembangunan bendungan/waduk di seluruh wilayah Tanah Air. Didasari oleh keyakinan tersebut, guna memastikan tercapainya target pembangunan infrastruktur ketahanan pangan, pada tanggal 25 Juli 2015, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan mendadak ke Bendungan Raknamo di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk melihat langsung kemajuan (progress) dari pembangunan bendungan tersebut. Pembangunan yang semula ditargetkan akan selesai dalam lima tahun, pada saat kunjungan tersebut dinyatakan akan rampung dalam tiga tahun mengingat proses pengerjaan dilakukan secara marathon. Akselerasi pembangunan infrastruktur bendungan tersebut menunjukkan komitmen sungguh-sungguh dari pemerintah untuk segera merealisasikan penyelesaian pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah di Indonesia, baik berupa bendungan, waduk, jalan, dan lain sebagainya.

Pembangunan bendungan dipandang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengupayakan ketahanan pangan karena kunci ketahanan pangan di wilayah tersebut adalah ketersediaan pasokan air. Pasokan air yang mencukupi akan memudahkan masyarakat untuk bercocok tanam, baik berupa tanaman jagung, ketela, maupun sorgum. Melalui pembangunan tujuh waduk dan 100 embung di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur, produksi pertanian di NTT mengalami peningkatan. Fokus Pemerintah pada sektor pertanian akan terus diupayakan dengan terus meningkatkan program-program pembangunan di sektor pertanian. Hal tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dari produksi pertanian, industri pertanian, dan penanganan pasca panen.

Dalam kesempatan berbeda, pada saat meresmikan Pabrik 5 PT Pupuk Kaltim dan Pabrik Asam Fosfat II PT Petrokimia Gresik, di Kantor Pusat PT Pupuk Kaltim, Bontang, Kalimantan Timur,

tanggal 19 November 2016, Presiden Joko Widodo menyambut baik peresmian Pabrik 5 Pupuk Kaltim, dengan kapasitas 825 ribu ton amoniak dan 1 juta 100 ton urea, serta pabrik Asam Fosfat yang berlokasi di Gresik Jawa Timur, dengan kapasitas 200 ribu ton asam fosfat dan 600 ribu ton asam sulfat. Keberadaan kedua pabrik tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian swasembada pangan dan kemandirian pangan.

Kebutuhan terhadap pasokan pupuk yang memadai dipandang sebagai kebutuhan yang sangat krusial untuk diupayakan oleh Pemerintah. Peresmian Pabrik Asam Fosfat II merupakan langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah sebagai antisipasi terhadap prediksi bahwa bidang pangan memiliki peran strategis pada masa yang akan datang, yang salah satunya mensyaratkan pasokan pupuk yang memadai. Proyek revamping Asam Fosfat sendiri berperan dalam menjamin pasokan sekaligus menjamin penghematan biaya bahan baku NPK hingga US\$ 20 juta per tahun.

Dari tahun 2015 sampai tahun 2018, Pemerintah telah membangun **55 bendungan** yang terdiri dari 14 bendungan yang telah selesai dan 41 bendungan lainnya dalam penyelesaian.



Infografis *progress* pembangunan bendungan
sumber: Kementerian PUPR

Komitmen Pemerintah untuk terus menyiapkan infrastruktur dalam upaya meningkatkan konektivitas nasional dan efisiensi ekonomi juga terlihat pada peninjauan Presiden pada pembangunan Waduk Gondang di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 11 Maret 2016. Waduk yang mengairi kurang lebih 4800 hektar lahan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian. Peninjauan serupa juga dilakukan pada pembangunan Bendungan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, tanggal 17 Maret 2016. Bendungan yang pembangunannya telah direncanakan sejak tahun 1960-an tersebut sebelumnya terkendala dengan masalah pembebasan

lahan. Dalam perkembangannya, proses pembebasan lahan 100% dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan diselesaikan dengan melakukan pendekatan secara baik kepada masyarakat setempat. Berkat sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pihak terkait lainnya, pembangunan Bendungan Jatigede dapat dilaksanakan.

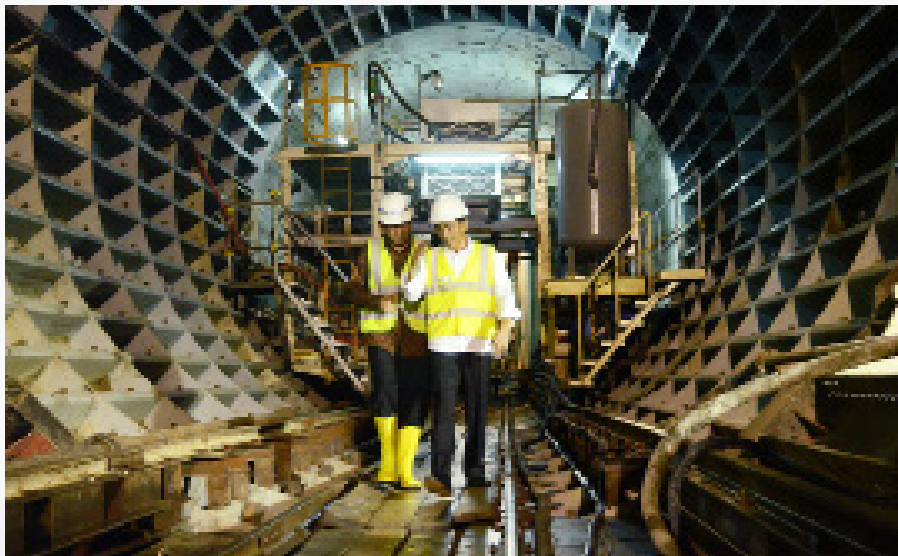
Saat peninjauan tersebut berlangsung, Bendungan Jatigede sudah mulai terisi hingga mencapai 40% dari total kapasitas air. Ketinggian air tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah, sehingga waduk Jatigede dapat mengairi 90.000 hektar sawah di Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan wilayah lain di sebelah utara waduk.

Salah satu wujud konkret dari capaian pembangunan infrastruktur ketahanan pangan Presiden Jokowi adalah Peresmian Bendungan Nipah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, pada tanggal 19 Maret 2016. Bendungan yang telah disetujui sejak tahun 1973, dan kemudian dimulai pembebasannya pada tahun 1982 tersebut mengalami kendala dalam pembangunannya pada tahun 1993 ketika saat itu masyarakat menolak pembangunannya, meskipun sempat dilanjutkan dan kemudian berhenti lagi di tahun 2008. Tidak berkenan, sehingga berhenti. Baru pada tahun 2015, permasalahannya sudah ditemukan dan diatasi dengan memotong punggung waduknya, dengan demikian tampungan air waduk tersebut dapat lebih turun.

2. Dukungan Infrastruktur Konektivitas

Pembangunan infrastruktur konektivitas diyakini akan memberikan kontribusi strategis terhadap upaya Pemerintah dalam mempermudah arus perpindahan orang maupun barang, sekaligus dapat berfungsi sebagai komponen utama

dalam meningkatkan daya saing dari produk-produk yang dihasilkan dari seluruh wilayah di Indonesia. Ketika meresmikan Groundbreaking Light Rail Transit (LRT) Indonesia pada tanggal 9 September 2015, di Taman Mini, Jakarta Timur, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur transportasi massal. Pembangunan infrastruktur transportasi massal super cepat, yang sempat tertunda dalam waktu yang lama, harus terus diupayakan oleh Pemerintah. Dalam kaitan itu, pada tanggal 2 September 2015, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) guna mempercepat penyelenggaraan kereta api ringan atau Light Rail Transit. Dan, enam hari setelah Perpres tersebut ditandatangani, proyek LRT Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang dapat segera dimulai. Melalui implementasi proyek-proyek pembangunan transportasi massal tersebut, diharapkan semua moda transportasi yang ada di DKI Jakarta, baik berupa MRT, LRT, bus Trans Jakarta, kereta bandara, maupun kereta cepat, semuanya dapat terintegrasi.



Presiden Jokowi pada peninjauan pembangunan MRT di Jakarta, tanggal 30 September 2016

Pada kesempatan yang sama, ditekankan juga bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur konektivitas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa, tetapi juga di wilayah lainnya di seluruh Tanah Air. Bahkan, melalui paradigma pembangunan Indonesia sentris yang tengah didorong oleh Pemerintah, pembangunan proyek infrastruktur konektivitas yang sebagian dibiayai oleh APBN lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas di luar Jawa. Hal tersebut terlihat pada fakta bahwa pada bulan yang sama, Pemerintah tengah mengimplementasikan pembangunan jaringan kereta api di Sulawesi, termasuk untuk rencana pembangunan proyek jaringan kereta api di Papua yang ketika itu masih dalam proses Feasibility Study (FS).

Pada saat melakukan peninjauan Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, tanggal 7 November 2015, Presiden menyampaikan kegembiraannya mengingat setiap kali melakukan peninjauan, perkembangan penyelesaian pembangunan ruas jalan tol Trans-Sumatera menunjukkan kemajuan yang pesat. Artinya, langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan ruas jalan tol tersebut telah menunjukkan efektivitasnya. Langkah strategis yang dimaksud di antaranya dengan menunjuk empat BUMN untuk membangun empat ruas jalan tol tersebut serta menyuntikkan PMN (Penyertaan Modal Negara) kepada BUMN agar anggaran tidak hanya terfokus di Kementerian PUPR.



Infografis *progress* pembangunan jalan tol
sumber: Kantor Staf Presiden (KSP)

Peresmian tol Trans Jawa ruas Kartasura-Sragen di Ngemplak, Surakarta, Jawa Tengah, tanggal 15 Juli 2018, yang diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo menandai kemajuan dari target penyelesaian proyek konektivitas jaringan jalan Tol Trans Jawa, mulai dari Merak hingga Banyuwangi secara bertahap. Ruas tol sepanjang 35 kilometer yang baru diresmikan tersebut memberikan kontribusi terhadap kemudahan dan kelancaran mobilitas orang dan barang sekaligus menurunkan biaya logistik.

Sebagai wujud pelaksanaan salah satu fungsi pembangunan infrastruktur konektivitas dalam memacu pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini ekonomi lokal, Pemerintah menghendaki titik-titik kegiatan ekonomi di sepanjang jalan tol tersebut, seperti rest area, diisi oleh merek-merek asing, seperti produk McD, Kentucky, maupun Starbucks, melainkan harus menjajakan makanan lokal seperti sate, soto, tahu guling, atau gudeg yang dijual oleh warga sekitar. Bahkan, Menteri BUMN dan Menteri PUPR secara khusus diinstruksikan untuk bekerja sama dengan kabupaten/

kota dan provinsi, sehingga batik dan telur asin sebagai produk khas lokal, bisa dijual di rest area. Bupati Batang diharapkan dapat berkontribusi dengan mencari lahan dan bekerja sama dengan BUMN untuk memfasilitasi para pedagang lokal, sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa ditinggal dengan pembangunan ini.

Pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan dalam rangka persaingan global, tidak ada kata lain bahwa Indonesia harus semakin memperkuat competitiveness index atau daya saing. Jika hal ini tidak dilakukan, maka negara ini akan semakin tertinggal oleh negara-negara lain.

Pada kenyataannya, Indonesia sudah ditinggal oleh negara-negara tetangga dalam stok infrastruktur dan daya saing. Indonesia sudah kalah dengan Singapura, Malaysia, Filipina, dan Viet Nam. Presiden tidak menginginkan nanti Indonesia akan ditinggal lagi oleh Laos dan Kamboja, karena ketidakcepatan dalam membangun hal-hal yang fundamental. Setelah pembangunan dan investasi di bidang infrastruktur, maka tahapan besar kedua adalah investasi di sumber daya manusia.

Saat Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, 16 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, Jakarta Pusat. Presiden menyatakan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya untuk dinikmati pada masa sekarang, tapi juga harus dirasakan dalam jangka panjang. Pembangunan mesti berkesinambungan. Salah satu penyangga keberlanjutan pembangunan adalah ketersediaan infrastruktur.

Selama empat tahun ini, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air. Pemerintah

mempercepat pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial. Pemerintah bekerja untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan sumber daya manusia Indonesia sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru didorong terus tumbuh sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan, dan jalan tol dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada UMKM.

Konektivitas yang makin tersambung akibat pembangunan infrastruktur bukan hanya akan membuat ekonomi lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga akan mempersatukan rakyat Indonesia sebagai bangsa. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi massal modern di perkotaan, seperti LRT dan MRT, akan membangun budaya baru, peradaban baru dalam bidang transportasi massal. Peradaban baru yang tidak ada pembandingnya dalam sejarah negara karena sama sekali belum pernah dilakukan.

Sekali lagi, pembangunan fisik juga sekaligus bagian dari strategi kebudayaan dalam menghadapi tantangan-tantangan kekinian dan masa depan. Tol laut terus dikuatkan konektivitasnya dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, yang dari tahun 2015 sampai 2017 sudah mencapai 477 lokasi. Antara tahun 2015 sampai 2017, sudah terbangun jalur kereta api yang panjang akumulatif-nya sekitar 369 kilometer spoor rel kereta, sudah terbangun 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol yang sudah operasional.

Pemerintah terus membangun dan mengintegrasikan jalan Trans Sumatra, Trans Jawa, Trans Papua, yang membuka

kesempatan-kesempatan baru bagi rakyat. Jalan-jalan tersebut menjadi bagian dari keberhasilan pengelolaan arus mudik Lebaran tahun 2018, yang berjalan lancar, nyaman, dan penuh keriang.

3. Dukungan Infrastruktur Energi

Pada saat memberikan sambutan pada Acara Construction Kick-Off Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang 2 X 1.000 MW dan Peresmian Program Elektrifikasi 50 Lokasi di Pulau Terdepan dan Daerah Perbatasan, di Desa Ujungnegoro, Batang, Jawa Tengah, tanggal 28 Agustus 2015, Presiden menyampaikan bahwa proyek yang sempat tertunda selama empat tahun tersebut dapat dilakukan construction kick-off. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi program prioritas Pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah bisa menunjukkan kepada investor bahwa Pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan investasi.



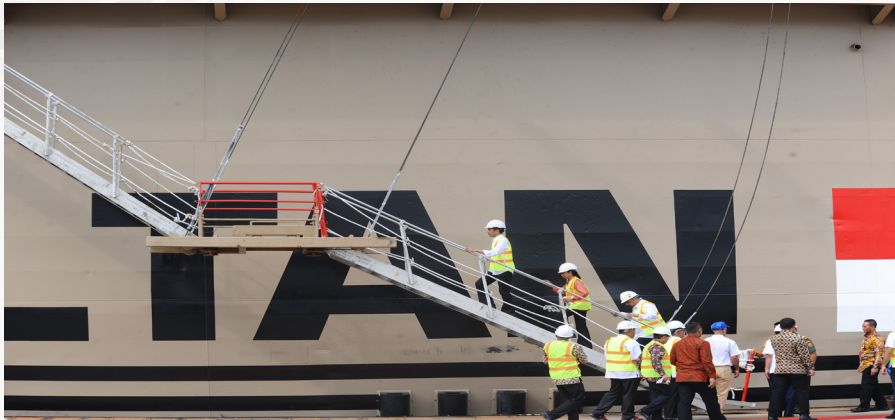
Presiden Jokowi pada peninjauan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 28 Agustus 2015

Sementara itu, pada saat memberikan sambutan pada Groundbreaking Proyek-Proyek Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Kawasan Industri Buluminung, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tanggal 19 November 2015, Presiden menyampaikan keprihatinannya bahwa selama 70 tahun merdeka, Indonesia hanya bisa membangun 53 ribu megawatt. Dan dalam lima tahun pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 35 ribu megawatt karena daya sebesar itu bukanlah semata-mata angka yang ditargetkan oleh Pemerintah, tetapi kebutuhan mendesak dari masyarakat yang harus disediakan oleh Pemerintah.

Presiden juga mengungkapkan kegembiraannya karena telah berhasil melaksanakan groundbreaking proyek-proyek infrastruktur yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Namun demikian, Presiden menekankan untuk tidak terlena oleh groundbreaking, tetapi juga harus segera dimulai pengerjaannya. Presiden juga akan secara rutin melakukan pengecekan secara langsung untuk memastikan pengerjaan proyek tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Presiden mencontohkan bahwa dirinya sudah melakukan pengecekan terhadap proyek jalan tol Trans-Sumatra sebanyak tiga kali dalam satu tahun.

Ketika memberikan Keterangan Pers pada saat meresmikan Pengoperasian Marine Vessel Power Plant (MVPP) PT. PLN (Persero) di Pelabuhan PT. Indonesia Kendaraan Terminal (PT. IKT) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, tanggal 8 Desember 2015, Presiden menyampaikan bahwa setiap dirinya melakukan kunjungan ke daerah, keluhan yang disampaikan sebagian besar terkait kurangnya pasokan listrik. Untuk itu, selain program penyediaan pasokan energi listrik sebesar 35.000 megawatt yang tengah diupayakan oleh Pemerintah, diperlukan pula crash

program yang cepat untuk mengatasi kurangnya pasokan listrik tersebut. Dan, Pemerintah telah memesan lima pembangkit listrik di atas kapal seperti MVPP tersebut. Peluncuran MVPP tersebut diperuntukkan sebagian besar untuk beroperasi di wilayah timur Indonesia, yakni Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan sisanya untuk wilayah Sumatera Utara.



Presiden Jokowi pada peresmian beroperasi kapal PLTG Karadeniz Poweship Zeynep, milik perusahaan Turki Karpowership, Pelabuhan PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tanjung Priok, tanggal 8 Desember 2015

Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, kita memiliki 17.000 pulau, MVPP dipandang tepat untuk dioperasikan di Indonesia. Untuk itu, MVPP berikutnya Presiden menginstruksikan untuk dapat dibangun di Indonesia karena banyaknya kebutuhan akan kapal MVPP, baik melalui skema kerja sama dengan BUMN, dalam hal ini PT PLN (Persero), atau pihak Swasta.

Pada kesempatan lain, ketika menyampaikan keterangan pers usai melakukan peninjauan Bandara Internasional Supadio dan pertemuan dengan Menteri ESDM di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, tanggal 23 Maret 2016, Presiden menyinggung mengenai isu Blok Masela. Presiden menyampaikan bahwa terkait Blok Masela, diperlukan banyak masukan dan pertimbangan yang

dalam mengingat Blok Masela adalah sebuah proyek jangka Panjang, tidak hanya setahun atau dua tahun, tidak hanya 10 tahun atau 15 tahun, tetapi proyek yang sangat panjang dan menyangkut ratusan triliun rupiah.

Oleh sebab itu, dari kalkulasi dan pertimbangan-pertimbangan yang ada, Presiden memutuskan untuk dibangun di darat. Pertimbangan yang pertama adalah Pemerintah menginginkan agar proyek tersebut memiliki dampak positif terhadap perekonomian di daerah, juga ekonomi nasional. Yang kedua, diharapkan, pembangunan wilayah atau regional development juga akan terkena dampak positif dari pembangunan proyek Masela tersebut.

Sementara itu, terkait program pemenuhan energi listrik, ketika memberikan sambutan pada groundbreaking Mobile Power Plant (MPP) 350 MW se-Region Sumatra di Kecamatan Merwang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, tanggal 1 Juni 2016, Presiden mengingatkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah sangat tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Untuk itu, Presiden ingin memastikan bahwa proyek MPP tersebut berjalan dan selesai pada bulan September dengan daya sebesar 2X25 megawatt. Diharapkan, dengan adanya MPP tersebut, tidak ada lagi keluhan dari dunia industri, dari hotel, maupun keluhan dari masyarakat terkait pasokan listrik. Dan dalam rangka akselerasi proses pembangunannya, MPP tersebut diinstruksikan untuk memakai gas, karena bila menggunakan batu bara, baru dapat diselesaikan hingga empat sampai dengan 4,5 tahun. Presiden juga menampik kemungkinan menggunakan energi nuklir mengingat sudah diputuskan untuk menggunakan gas yang dipasok oleh Perusahaan Gas Negara (PGN). Selain Pemerintah, masyarakat diharapkan juga ikut mengawasi prosesnya sehingga pengerjaan dapat diselesaikan sesuai

target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kekhawatiran masyarakat bahwa proyek tersebut akan terbengkalai sebagaimana PLTG-PLTG sebelumnya dapat diminimalisasi.



Presiden Jokowi pada *groundbreaking* 6 pembangkit *Mobile Power Plant* (MPP) regional Sumatera yang dipusatkan di PLTU Air Anyir, Bangka Belitung, tanggal 1 Juni 2016

Komitmen Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dengan terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur energi juga terlihat pada saat melakukan *Groundbreaking* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lontar Extension #4 (1X315MW) dan Peresmian Gardu Induk Serta Transmisi di Wilayah Jakarta Raya dan Banten, tanggal 10 Juni 2016. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa kebutuhan energi listrik untuk wilayah Jawa-Bali masih membutuhkan 21 ribu megawatt. Kebutuhan sebesar itu jika tidak dapat segera dipenuhi, maka pada tahun 2019 akan ada kekurangan listrik di Jawa dan Bali. Hal tersebut yang membuat Presiden beserta jajaran Pemerintah terkait bekerja keras untuk

mempercepat pengadaan listrik 35 ribu megawatt di seluruh Indonesia.



Presiden Jokowi pada *groundbreaking* PLTU Lontar Extension, di Tangerang, Banten, tanggal 10 Juni 2016

Listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Pemerintah tidak menginginkan masih adanya anak-anak yang tidak mendapatkan penerangan yang cukup di malam hari untuk belajar karena anak-anak merupakan aset vital sebuah bangsa. Selain itu, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum mendapatkan penerangan yang cukup ketika malam hari. Tidak memadainya pasokan listrik juga mengakibatkan usaha kecil, usaha-usaha mikro, yang ada di kampung dan di desa-desa tidak dapat beroperasi.

Untuk Provinsi Banten sendiri, Presiden mendapatkan laporan bahwa masih ada wilayah di Banten yang belum dialiri listrik, yakni Banten bagian selatan. Untuk itu, Presiden memerintahkan Menteri ESDM agar wilayah yang belum dialiri listrik dapat segera mendapatkan pasokan listrik bekerja sama dengan Pemerintah

daerah setempat.



Presiden Jokowi pada *groundbreaking* Mobile Power Plant (MPP) Jeranjang, di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, tanggal 11 Juni 2016

Selain itu, ketika melakukan peninjauan proyek Pembangunan Proyek Mobile Power Plant (MPP) 2X25 MW Jeranjang, di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 11 Juni 2016, Presiden kembali menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan pemantauan ke lapangan terhadap kemajuan proyek pembangunan yang telah diputuskan. Selain itu, Presiden juga terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mengetahui secara langsung wilayah mana saja yang masih kekurangan pasokan listrik dan sekaligus melakukan estimasi terhadap langkah strategis yang dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut. Bahkan, Presiden juga membuka kemungkinan adanya konversi menuju energi bersih atau energi terbarukan.

Presiden memberikan perhatian pada pemenuhan kebutuhan listrik untuk wilayah NTB mengingat pertumbuhan

ekonomi di NTB telah mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, jauh melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 9,9%. Untuk itu, Presiden tidak menginginkan geliat pertumbuhan ekonomi tidak diantisipasi dengan penambahan daya listrik sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Presiden menceritakan ketika melakukan kunjungan ke Korea, Rusia, dan Jepang. Para Kepala Negara tersebut memuji ekonomi Indonesia karena dapat bertahan manakala ekonomi global tengah mendapatkan tekanan, bahkan ada negara yang pertumbuhannya minus, selain ada yang hanya tumbuh satu sampai dua persen dan mengakibatkan banyaknya pengangguran. Namun demikian, di tengah pujian yang datang dari negara-negara sahabat tersebut Presiden masih merasa prihatin atas kenyataan bahwa masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia masih mengalami krisis listrik yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo terus berupaya memenuhi target penyediaan energi listrik nasional melalui pembangunan infrastruktur-infrastruktur pembangkit listrik. Ketika meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) 4X25 MW Parit Baru di Jungkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 18 Maret 2017, Presiden mengungkapkan kegembiraannya bahwa target penyelesaian yang ditetapkan pada saat peletakan batu pertama dapat diselesaikan secara tepat waktu. Terlebih lagi, yang dikerjakan saat itu bukan hanya pembangkit listrik di Mempawah, atau di Kalimantan Barat saja, tetapi terdapat delapan proyek infrastruktur kelistrikan yang juga dikerjakan dalam waktu yang bersamaan dan kesemuanya telah diselesaikan secara tepat waktu, dengan kapasitas sebesar 500 megawatt.



Presiden Jokowi pada Peresmian PLTG *Mobile Power Plant* (MPP) Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 18 Maret 2017

Presiden juga berpesan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk menjaga pertumbuhan ekonominya mengingat capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, yakni 5,22 persen berbanding 5,02 persen. Bila listrik tidak disiapkan, maka investor akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Kalimantan Barat mengingat pentingnya energi listrik bagi industri. Hal yang sama juga berlaku bagi daerah lain di seluruh Indonesia.

Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa karena MPP tersebut bersifat mobile, setiap saat dapat dipindah ke wilayah lain yang masih sangat membutuhkan. Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri ESDM agar gas untuk pembangkit listrik MPP tersebut dapat diberikan prioritas sehingga harganya bisa lebih efisien. Dan terkait dengan 34 pembangkit listrik yang mangkrak, Presiden memerintahkan untuk dapat dilanjutkan dengan catatan sudah aman secara hukum dan sesuai dengan kualitas yang diinginkan mengingat

proyek tersebut telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.

Pada saat memberikan sambutan pada Peresmian Listrik Desa Papua-Papua Barat, Maluku-Maluku Utara, dan Peresmian PLTMH dan PLTS Tersebar, Peresmian PLTU Maluku Utara 2 X 7 MW serta groundbreaking PLTMG MPP Jayapura 50 MW, di Distrik Muara Tami, kota Jayapura, Provinsi Papua, tanggal 9 Mei 2017, Presiden menyampaikan bahwa dirinya akan terus memantau percepatan pemenuhan kekurangan pasokan listrik yang sudah sangat mendesak di kawasan Indonesia Timur, terutama Papua.

Salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik di Papua adalah groundbreaking PLTMG MPP di Jayapura 50 MW tersebut. Di saat yang bersamaan, Presiden juga meresmikan PLTU Tidore, Maluku Utara 2x7 MW, yang merupakan PLTU pertama yang beroperasi di Maluku Utara dan peresmian Listrik Desa untuk Papua dan Maluku Utara. Pemerintah akan terus mendorong percepatan berbagai pembangkit listrik di seluruh Tanah Air agar Pemerintah dapat membangkitkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh seluruh anak bangsa.

4. Dukungan Infrastruktur Telekomunikasi

Realisasi pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas nasional dan efisiensi ekonomi juga terlihat dari capaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Selain mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi di sektor swasta, Pemerintah juga membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, demi memperluas cakupan jaringan, terutama pemenuhan akses masyarakat terhadap teknologi komunikasi.

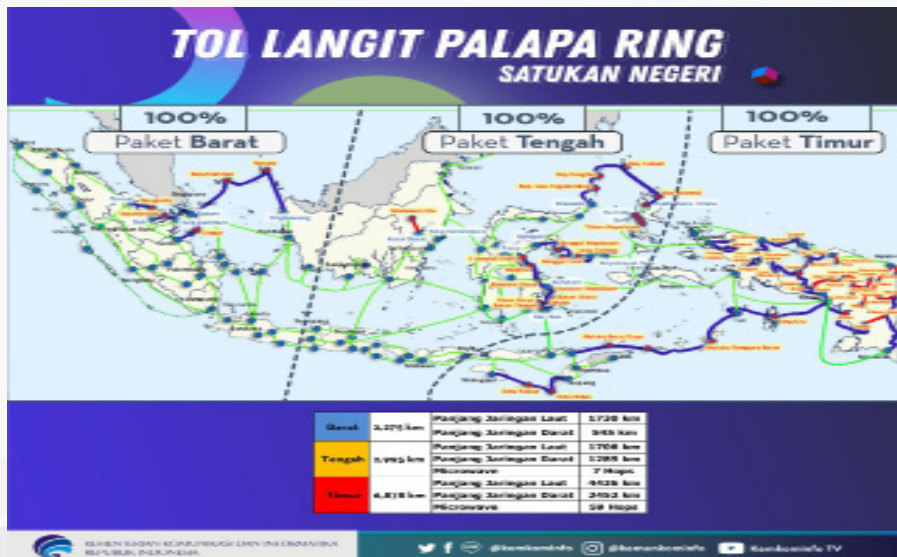
Dewasa ini, proses berjalan terkadang sudah dapat dilakSalah satu capaian pembangunan infrastruktur

telekomunikasi di era Presiden Joko Widodo adalah saat diresmikannya Financial Close Proyek Jaringan Serat Optik Palapa Ring Tengah dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek Jaringan Serat Optik Palapa Ring Timur dengan PT. Palapa Timur Telematika, tanggal 29 September 2016, di Istana Negara, Jakarta. Palapa Ring adalah salah satu proyek strategis nasional dan proyek prioritas dalam bidang infrastruktur telekomunikasi yang diyakini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Proyek Palapa Ring merupakan proyek pembangunan jaringan serat optik sebagai tulang punggung sistem telekomunikasi nasional, yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal tersebut sekaligus dipandang sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam merealisasikan program-program pembangunan yang telah dicanangkan.

Melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan daya saing nasional terhadap dunia internasional yang saat ini bergerak dengan sangat cepat. Komitmen untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam penyediaan infrastruktur pendukung teknologi informasi dan komunikasi semakin kuat setelah Presiden melakukan kunjungan kantor perusahaan Google dan Plug and Play di Amerika Serikat pada bulan Februari 2016, serta kunjungan ke kantor pusat Alibaba di Tiongkok pada bulan September 2016. Dengan inovasi teknologi yang dikembangkan, perusahaan-perusahaan tersebut telah mempersiapkan entrepreneurship dengan sangat matang. Kunjungan ke perusahaan-perusahaan tersebut juga semakin menegaskan urgensi penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses dari seluruh wilayah di Indonesia mengingat infrastruktur yang ada di Indonesia telah jauh tertinggal dari negara-negara tersebut.

Indonesia sejatinya memiliki potensi dan kekuatan digital ekonomi yang sangat besar bila semua pihak dapat melakukan akselerasi mengejar ketertinggalan. Salah satu upayanya adalah dengan mempersiapkan retail and logistic platform sendiri yang dapat bersaing secara head to head dengan negara lain. Selain itu, Indonesia juga perlu memiliki marketplace asli Indonesia yang besar serta brand dan principal yang juga besar.

Kerja keras Pemerintah dalam menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi menuai hasil ketika Presiden melakukan peresmian operasional Palapa Ring di Istana Negara, Jakarta, tanggal 14 Oktober 2019, meskipun sebelumnya Palapa Ring Indonesia bagian Timur mengalami sedikit keterlambatan karena beratnya medan yang dihadapi. Pada kesempatan tersebut, kembali ditekankan bahwa dunia telah berubah dari era analog menuju era digital, di mana melalui kemajuan teknologi digital belakangan ini, telah mampu menerobos batasan jarak, menerobos batasan waktu, komunikasi. Dengan demikian, pengiriman informasi bisa dilakukan sangat cepat tanpa kendala jarak dan waktu.



Infograsfis operasional Palapa Ring
sumber: Kementerian Kominfo

Peresmian Operasional Palapa Ring tersebut, yang disebut juga sebagai Tol Langit Indonesia, diharapkan dapat menjadi solusi atas ketimpangan yang tajam antardaerah-daerah di Indonesia dalam hal konektivitas digital. Melalui pembangunan infrastruktur Tol Langit tersebut, diyakini tidak hanya memajukan sektor ekonomi, sektor sosial, budaya, politik, dan sektor pemerintahan, tetapi juga sebagai wadah pemersatu bangsa, dari Sabang sampe Merauke, dari Miangas sampe Pulau Rote. Seluruh daerah di Tanah Air bisa saling terhubung, saling mengenal, dan saling berinteraksi satu sama lain.

Konektivitas digital yang telah disediakan oleh Pemerintah harus dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa, untuk penguatan persatuan dan persaudaraan di antara seluruh komponen anak bangsa, untuk memperkuat dan memperbaiki pendidikan, memfasilitasi lalu lintas ilmu pengetahuan, dan menembus seluruh pelosok nusantara. Dan, secara khusus, dapat digunakan untuk memperkuat perdagangan, menghubungkan produk-produk UMKM ke jaringan pasar nasional, bahkan pasar global.

Palapa Ring diharapkan juga mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan pemerataan kesempatan dalam hal akses terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV

PENUTUP

Prioritas Pemerintah pada pembangunan infrastruktur salah satunya dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa infrastruktur merupakan instrument vital bagi upaya Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, setiap kali calon investor melakukan analisa awal sebelum berinvestasi di sebuah negara atau di suatu wilayah, pertimbangan utamanya adalah dukungan infrastruktur yang tersedia di wilayah tersebut.

Lebih jauh, Presiden mengilustrasikan pentingnya pembangunan infrastruktur dengan mencontohkan situasi ketika sebuah kawasan industri tidak akan mampu menarik investor apabila tidak didukung dengan kapasitas pelabuhan yang mampu menampung kapal berukuran besar untuk merapat. Untuk itu, dukungan dari seluruh pihak dalam mendukung prioritas Pemerintah dalam mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur sangat diperlukan.

Pentingnya dukungan dan pengertian dari seluruh komponen bangsa sangat berarti bagi Pemerintah bila berkaca dari situasi ketika banyaknya penolakan dan komentar sinis dari masyarakat

terkait groundbreaking proyek MRT di Jakarta, maupun ketika groundbreaking proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Penolakan tersebut dipandang kontraproduktif dengan tujuan strategis Pemerintah mengingat proyek tersebut dapat meminimalisasi kerugian yang diakibatkan oleh kemacetan yang terjadi di daerah tersebut.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa kemacetan yang terjadi di Jakarta membawa kerugian ekonomi hingga sebesar Rp35 triliun. Sebagai perbandingan, negara Tiongkok dapat membangun kereta api cepat sepanjang 16 ribu kilometer dalam waktu delapan tahun. Hal itu berarti setiap tahun dapat dibangun 2 ribu km. Sementara Indonesia, baru membangun 150 km sudah mendapat penentangan dari masyarakat.

Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur lainnya, dalam hal ini dicontohkan terkait pembangunan infrastruktur jalan tol. Di Tiongkok, sudah terbangun jalan tol sepanjang 60 ribu km, sementara Indonesia baru dapat membangun sepanjang 840 km jalan tol setelah 70 tahun merdeka. Untuk itu, di tengah pesimisme dari sebagian masyarakat, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk terus mengejar keteringgalan untuk dapat membangun 1.100 km. Pemantauan secara langsung di lapangan terus akan dilakukan guna mengetahui dan mengatasi secara cepat kendala-kendala di lapangan. Dengan demikian, penyelesaian proyek pembangunan infrastruktur tersebut, baik infrastruktur konektivitas maupun infrastruktur lainnya, dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden saat memberikan sambutan pada acara Dialog Publik Bersama Presiden Ri: Membangun Ekonomi Indonesia yang Berdaya Saing di Balai Kartini, Jakarta, tanggal 30 Maret 2016.

A. Tantangan dan Harapan pada Periode Kedua Pemerintah Presiden Joko Widodo

Pada saat menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN Tahun 2020, tanggal 3 Oktober 2019, di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Meskipun belum besar-besaran, Pemerintah telah memulai reformasi struktural. Dengan demikian, diharapkan pada periode selanjutnya reformasi struktural akan dilaksanakan secara besar-besaran dalam rangka meningkatkan daya saing serta memangkas aturan/prosedur yang menghambat atau berbelit-belit yang masih ada saat ini.

Selain itu, penguatan di bidang pengawasan dan pengendalian atas implementasi kebijakan maupun eksekusi atas pelaksanaan reformasi struktural juga akan terus diperkuat. Hal tersebut akan menjadi penekanan dalam perancangan RPJMN Tahun 2020-2024. Sebagai persiapan implementasi APBN tahun 2020, Presiden menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah bahwa tahun 2020, yang merupakan tahun pertama pada periode pembangunan RPJMN 2020-2024, akan difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran, tanpa meninggalkan pembangunan infrastruktur yang telah kita mulai lima tahun yang lalu.

Untuk itu, Presiden berharap reformasi pemerataan kualitas pendidikan, sebagai fondasi yang sudah disusun selama 2014-2019, dapat dilanjutkan. Selain itu, program pelatihan kewirausahaan/enterpreneurship yang dimiliki masing-masing kementerian dan lembaga dapat disinergikan

B. Fokus Pembangunan Pemerintahan Selanjutnya

Pada saat menyampaikan sambutan pada acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Provinsi Jawa Barat, tanggal 14 Juli 2019, Presiden menyampaikan bahwa semua komponen bangsa harus menyadari saat ini kita hidup dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis. Fenomena global yang ciri-cirinya penuh dengan perubahan, penuh kecepatan, penuh risiko-risiko, penuh kompleksitas, dan penuh kejutan-kejutan yang seringkali jauh dari kalkulasi kita, mengharuskan kita semua mencari sebuah model, cara, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap permasalahan.

Cara-cara lama, pola-pola lama dalam mengelola organisasi, baik dalam mengelola lembaga-lembaga maupun dalam mengelola pemerintahan harus segera ditinggalkan. Pola-pola dan kebiasaan yang sudah tidak efektif harus dibuat menjadi efektif, dan yang sudah tidak efisien harus dibuat menjadi efisien. Manajemen seperti inilah yang diperlukan oleh bangsa Indonesia sekarang ini.

Indonesia harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan itu. Oleh sebab itu, kita Pemerintah akan menyiapkan tahapan-tahapan besar.

Dalam bidang pembangunan infrastruktur, Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur utama telah dibangun dan, ke depan, kita dilanjutkan dengan lebih cepat untuk menyambungkan infrastruktur-infrastruktur utama tersebut. Infrastruktur-infrastruktur tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat, akan disambungkan dengan kawasan-kawasan industri kecil, diambungkan dengan Kawasan-Kawasan Ekonomi Khusus dan kawasan-kawasan

pariwisata, termasuk menyambungkan dengan kawasan-kawasan persawahan, dengan kawasan-kawasan perkebunan, bahkan dengan tambak-tambak perikanan.

REFERENSI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara tanggal 21 Oktober 2015

Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja Tahun 2014 pada tanggal 4 November 2014 di Istana Negara, Jakarta

Pembukaan Kompas 100 CEO Forum di Hotel Four Seasons Jakarta, tanggal 7 november 2014

Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Tahun 2017, 17 Februari 2017, di Istana Negara

kawasan-kawasan industri kecil, diambungkan dengan Kawasan-Kawasan Ekonomi Khusus dan kawasan-kawasan pariwisata, termasuk menyambungkan dengan kawasan-kawasan persawahan, dengan kawasan-kawasan perkebunan, bahkan dengan tambak-tambak perikanan.

kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, tanggal 23 Maret 2016

Rapat Kerja Pemerintah dengan Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, tanggal 21 Oktober 2015

Rapat Kerja Nasional Partai Nasional Demokrat di Jakarta, tanggal 21 September 2015

Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Istana Negara, Jakarta, tanggal 30 November 2016

Menerima Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LI dan LII Lembaga Ketahanan Nasional Lemhannas RI tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, tanggal 18 November 2014

Silaturahmi dengan Dunia Usaha di Jakarta Convention Center, Jakarta, tanggal 9 Juli 2015

Peninjauan Pembangunan Bendungan Raknamo di Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 Juli 2015

Musyawarah Nasional VIII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, tanggal 28 Juli 2015

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penganugerahan Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2016, di Istana Negara Jakarta, tanggal 14 Desember 2015

Pembukaan Musyawarah Nasional IV Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, tanggal 17 Desember 2015

Pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia Tahun 2017 di Jakarta Convention Center, tanggal 2 Februari 2017

kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, tanggal 23 Maret 2016

Rapat Kerja Pemerintah dengan Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, tanggal 21 Oktober 2015

Rapat Kerja Nasional Partai Nasional Demokrat di Jakarta, tanggal 21 September 2015

Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Istana Negara, Jakarta, tanggal 30 November 2016

Menerima Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LI dan LII Lembaga Ketahanan Nasional Lemhannas RI tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, tanggal 18 November 2014

Silaturahmi dengan Dunia Usaha di Jakarta Convention Center, Jakarta, tanggal 9 Juli 2015

Peninjauan Pembangunan Bendungan Raknamo di Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 Juli 2015

Musyawarah Nasional VIII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, tanggal 28 Juli 2015

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penganugerahan Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2016, di Istana Negara Jakarta, tanggal 14 Desember 2015

Pembukaan Musyawarah Nasional IV Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, tanggal 17 Desember 2015

Pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia Tahun 2017 di Jakarta Convention Center, tanggal 2 Februari 2017

Peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tanggal 17 Maret 2017

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-44 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta Convention Center, tanggal 10 Januari 2017

Peresmian Pabrik 5 PT Pupuk Kaltim dan Pabrik Asam Fosfat II PT Petrokimia Gresik, di Kantor Pusat PT Pupuk Kaltim, Bontang, Kalimantan Timur, tanggal 19 November 2016

Peresmian Bendungan Nipah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, pada tanggal 19 Maret 2016

Groundbreaking Light Rail Transit (LRT) Indonesia pada tanggal 9 September 2015, di Taman Mini, Jakarta Timur

Peninjauan Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatra di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, tanggal 7 November 2015

Peresmian tol Trans Jawa ruas Kartasura-Sragen di Ngemplak, Surakarta, Jawa Tengah, tanggal 15 Juli 2018

Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, dalam rangka HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, Jakarta, tanggal 16 Agustus 2018

Construction Kick-Off Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang 2 X 1.000 MW dan Peresmian Program Elektrifikasi 50 Lokasi di Pulau Terdepan dan Daerah Perbatasan, di Desa Ujungnegoro, Batang, Jawa Tengah, tanggal 28 Agustus 2015

Groundbreaking Proyek-Proyek Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Kawasan Industri Buluminung, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tanggal 19 November 2015

Peresmian Pengoperasian Marine Vessel Power Plant (MVPP) PT. PLN (Persero) di Pelabuhan PT. Indonesia Kendaraan Terminal (PT. IKT) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, tanggal 8 Desember 2015

Groundbreaking Mobile Power Plant (MPP) 350 MW se-Region Sumatra di Kecamatan Merwang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, tanggal 1 Juni 2016

Groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lontar Extention #4 (1X315MW) dan Peresmian Gardu Induk

Serta Transmisi di Wilayah Jakarta Raya dan Banten, tanggal 10 Juni 2016

Peninjauan proyek Pembangunan Proyek Mobile Power Plant (MPP) 2X25 MW Jeranjang, di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 11 Juni 2016

Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) 4X25 MW Parit Baru di Jungkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 18 Maret 2017

Peresmian Listrik Desa Papua-Papua Barat, Maluku-Maluku Utara, dan Peresmian PLTMH dan PLTS Tersebar, Peresmian PLTU Maluku Utara 2 X 7 MW serta groundbreaking PLTMG MPP Jayapura 50 MW, di Distrik Muara Tami, kota Jayapura, Provinsi Papua, tanggal 9 Mei 2017

Peninjauan Bandara Internasional Supadio dan pertemuan dengan Menteri ESDM di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, tanggal 23 Maret 2016

Financial Close Proyek Jaringan Serat Optik Palapa Ring Tengah dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek Jaringan Serat Optik Palapa Ring Timur dengan PT. Palapa Timur Telematika, tanggal 29 September 2016

Peresmian operasional Palapa Ring di Istana Negara, Jakarta, tanggal 14 Oktober 2019

Dialog Publik Bersama Presiden RI : Membangun Ekonomi Indonesia yang Berdaya Saing di Balai Kartini, Jakarta, tanggal 30 Maret 2016

Sidang Kabinet Paripurna mengenai Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN Tahun 2020, tanggal 3 Oktober 2019, di Istana Negara, Jakarta

Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Provinsi Jawa Barat, tanggal 14 Juli 2019

